

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tahun 1996-1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang tentang pengelolaan keuangan kepada daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah tergantung dari pemerintah daerah itu dalam memajukan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang telah diatur dalam UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Perkembangan kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemberian otonomi daerah tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59/2007 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan

kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif (Frestiliyani, 2010).

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Bati (2009) pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran PDB pada tingkat I maupun tingkat II.

Adanya desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan program belanja modal yang terorganisir dan seimbang, karena dengan adanya desentralisasi fiskal dapat menuntut tiap daerah untuk selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya. PAD adalah salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan.

Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya mendorong perekonomian daerah (Sari, 2013). Bati (2009) menyatakan bahwa dalam rangka

mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah belanja modal. Keberadaan anggaran belanja modal bersumber dari bantuan pusat dan PAD. Kebijakan desentralisasi memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain (Adi, 2006). Hal ini dalam Adi (2006) menyatakan bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Pemerintah daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Menurut Laporan akhir Lembaga Unswagati Cirebon (2012) PAD adalah sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemajuan ekonomi masyarakat tiap daerah. Bagaimana usaha dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber PAD lain yang sah. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak (Sabatini, dan Purwanti, 2012). Pertumbuhan PDRB yang berfluktuatif juga berpengaruh terhadap PAD (Sari, 2013).

Kedinamikaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan adanya upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan dorongan kepada daerah untuk lebih optimal dan tertib dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai refleksi pelaksanaan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (Adegustara dan Syofiatri, 2011).

Untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pengolahan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

Selain itu dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah membawa kabar baik bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan dengan memanfaatkan sektor pajak daerah.

Berlandaskan atas peraturan serta Undang-Undang tersebut, pajak daerah berfungsi sebagai PAD yang diperuntukkan bagi pembiayaan, pengeluaran pemerintah dan berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan

dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota.

Salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari pajak daerah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Khairunnisa, 2011).

Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan dan industri jasa adalah pajak hotel dan restoran. Seperti yang kita ketahui, bahwa dengan adanya hotel dan restoran menjadi pendukung potensi yang sangat besar terutama tumbuhnya aktivitas di dalam sektor pariwisata. Ini disebabkan pariwisata memang suatu hal yang menjadi daya tarik bagi turis domestik dan turis asing. Jadi, penerimaan PAD pajak hotel dan restoran dapat semakin meningkat.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata pada suatu daerah yang direfleksikan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB, serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Widiastuti, 2011). Hal itu diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2011) bahwa pengembangan daya tarik kepariwisataan diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah. Salah satunya dengan pengembangan sektor hotel dan restoran. Hal ini diimbangi dengan

sumbangan penerimaan PAD kota yang paling besar adalah di bidang pajak hotel dan restoran.

Pariwisata merupakan sebuah industri jasa yang digunakan sebagai salah satu pendorong perekonomian dunia. Pariwisata juga merupakan sektor yang sangat kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya, maupun ekonomi politik. Selain itu pariwisata sebagai kegiatan mata rantai yang akan melibatkan berbagai sektor dan lembaga yang terkait. Upaya pemerintah menjaring wisatawan baik asing maupun domestik dilakukan dengan berbagai konsep yang disebut dengan *trilogy* menciptakan pariwisata yang meliputi produk, pemasaran, dan kelembagaan (Iyangjaya, 2011).

Sektor pariwisata merupakan sektor yang strategis karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan di bidang perekonomian, untuk itu pemerintah daerah membuat suatu tahapan perencanaan yang baik untuk lebih menarik wisatawan yang berkunjung. Salah satunya, pemerintah daerah memiliki program perencanaan anggaran yaitu belanja promosi wisata yang termasuk dalam belanja modal daerah. Penyelenggaraan belanja di bidang wisata yang kondusif, diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di tiap daerah.

Promosi dilakukan sebagai usaha untuk memperbesar daya tarik objek wisata serta menginformasikan atau memberitahukan objek-objek dan atraksi wisata yang ada. Dengan seringnya melakukan promosi maka

diharapkan akan merangsang kunjungan wisatawan, diawali dengan komunikasi persuasi untuk membangkitkan perhatian dan pada akhirnya berlanjut menjadi minat untuk berkunjung (Yonathan, 2011).

Belanja promosi wisata di tiap-tiap daerah dapat berupa pelatihan pemandu wisata terpadu, penyelenggaraan *fun tour*, penyusunan dan penerbitan tabloid promosi wisata, pembelian *leaflet*, brosur, dll.

Karakteristik *promotion*, berupa promosi secara langsung dan tidak langsung. Promosi secara langsung terdiri dari peragaan (*display*), barang cetakan (*leaflet, booklet/brosur*), dan pameran khusus. Sedangkan promosi secara tidak langsung dapat berupa *review*, majalah, kunjungan dan temu karya (*workshop*) (Khairunnisa, 2011).

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata pada suatu daerah yang direfleksikan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB, serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan APBD (Widiastuti, 2013).

Archer dalam Widiastuti (2011) menyatakan bahwa jumlah volume pengeluaran wisatawan akan menciptakan dampak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel, dan restoran sehingga dapat meningkatkan PDRB

Peningkatan jumlah wisatawan akan membuat penerimaan pendapatan pada sektor pajak hotel dan restoran juga akan semakin tinggi.

Ini membuat kesejahteraan masyarakat semakin terjamin, khususnya masyarakat pengusaha hotel dan restoran di tiap daerah. Hal itu menjadi peluang bagi pelaku usaha pariwisata untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana pariwisata apabila ditinjau dari tingginya kenaikan jumlah kedatangan wisatawan di Indonesia (Yonathan, 2011).

Anggaran sektor pariwisata yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang salah satunya memuat tentang rincian anggaran dari belanja promosi wisata tiap tahun dapat dilihat perbandingan total anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya yang terjadi saat ini dinas pariwisata mengajukan permintaan anggaran yang lebih pada pemerintah tapi tidak terinci ataupun terealisasi dengan baik apakah anggaran yang diajukan tersebut khususnya untuk belanja promosi wisata dapat meningkatkan penataan kegiatan promosi wisata yang maksimal, karena apabila anggaran untuk belanja promosi wisata itu bertambah, maka seharusnya pelaksanaan kegiatan wisata dapat lebih menarik wisatawan asing maupun domestik untuk mengunjungi daerah tersebut.

Apabila jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat, maka seharusnya akan meningkatkan PAD pajak, khususnya pajak hotel dan restoran, karena memang hotel dan restoran menjadi tempat persinggahan para wisatawan untuk beristirahat dan menikmati wisata kuliner daerah tersebut. Peningkatan PAD pajak hotel dan restoran akan membuat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, khususnya pada pengusaha perhotelan dan restoran.

Yogyakarta dan Magelang merupakan wilayah yang cukup terkenal untuk dikunjungi para wisatawan asing ataupun domestik. Kedua wilayah ini memiliki keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan yang datang untuk berkunjung. Untuk itulah sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat mempengaruhi dalam peningkatan PAD pajak hotel dan restoran di wilayah tersebut. Peningkatan dalam PAD pajak hotel dan restoran akan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin meningkat, khususnya di Yogyakarta dan Magelang.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini akan menganalisis tentang “PENGARUH BELANJA PROMOSI WISATA TERHADAP PAD PAJAK HOTEL DAN RESTORAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah belanja promosi wisata berpengaruh positif terhadap PAD pajak hotel?
2. Apakah belanja promosi wisata berpengaruh positif terhadap PAD pajak restoran?
3. Apakah belanja promosi wisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat?
4. Apakah PAD pajak hotel berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Apakah PAD pajak restoran berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat?

6. Apakah belanja promosi wisata berpengaruh positif terhadap PAD pajak hotel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
7. Apakah belanja promosi wisata berpengaruh positif terhadap PAD pajak restoran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja promosi wisata terhadap PAD pajak hotel
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja promosi wisata terhadap PAD pajak restoran
3. Untuk mengetahui pengaruh PAD pajak hotel terhadap kesejahteraan masyarakat
4. Untuk mengetahui pengaruh PAD pajak restoran terhadap kesejahteraan masyarakat
5. Untuk mengetahui pengaruh belanja promosi wisata terhadap kesejahteraan masyarakat
6. Untuk mengetahui pengaruh belanja promosi wisata terhadap PAD pajak hotel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
7. Untuk mengetahui pengaruh belanja promosi wisata terhadap PAD pajak restoran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi aparat pemerintah, dapat digunakan untuk masukan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan kepentingan yang berkaitan dengan publik.

2. Bagi bidang akademis, penelitian ini memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi dan rancangan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.